

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah utama pembangunan di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tidak merata yang berdampak jangka panjang pada tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Tujuan inklusi keuangan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan individu dan antar daerah dalam masyarakat Indonesia.¹

Akses keuangan yang tidak merata telah lama diakui sebagai faktor kunci dalam mempertahankan ketimpangan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.² Berdasarkan database Global Findex Bank Dunia, Indonesia merupakan negara berkembang dimana pada tahun 2017 hanya 48% populasi orang dewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, seperti Malaysia (85%), Thailand (82%), India (80%), Kenya (82%), Sri Lanka (74%), dan Afrika Selatan (69%).³

Sementara berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 indeks inklusi keuangan secara nasional mencapai 67,8%,

¹ Ikrima Zaleda Zia and P. Eko Prasetyo, "Analysis of Financial Inclusion Toward Poverty and Income Inequality", *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 1, (July, 2018), hlm. 114.

² Unal Seven and Yener Coskun, "Does Financial Development Reduce Income Inequality and Poverty? Evidence from Emerging Countries", *Emerging Markets Review*, Vol. 26, (March, 2016), hlm. 34.

³ Hilman Hanivan and Nasrudin Nasrudin, "A Financial Inclusion Index for Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 22, No. 3, (October, 2019), hlm. 352.

sedangkan indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 11,1%, hal ini berarti dari setiap 100 penduduk Indonesia hanya 11 orang yang memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariah.⁴

Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan masyarakat miskin kesulitan memperoleh akses keuangan. Mohammad Mahbubi Ali, dkk., mengkaji hambatan yang dihadapi responden yang dikecualikan secara finansial dalam mengakses produk dan layanan lembaga keuangan Islam. Hasil studinya menemukan bahwa hambatan untuk memperoleh produk pembiayaan dan membuka rekening di lembaga keuangan Islam adalah lokasi, prosedur administrasi yang rumit, laporan keuangan yang tidak tepat, kurangnya dokumentasi yang diperlukan, kurangnya kepercayaan pada lembaga keuangan Islam dan biaya administrasi yang mahal. Sedangkan faktor lainnya yang menjadi hambatan adalah memiliki rekening bersama dengan anggota keluarga lainnya, memiliki akun konvensional, kurangnya informasi tentang produk dan layanan keuangan syariah dan teknologi yang kurang kompetitif.⁵

Pembangunan sektor keuangan dapat berdampak langsung terhadap kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan, serta secara tidak langsung dengan memberikan dampak yang menguntungkan pada pertumbuhan, yang membantu mengurangi

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017), hlm. 53.

⁵ Mohammad Mahbubi Ali, Abrista Devi, and Hamzah Bustomi, "Determinants of Financial Exclusion In Indonesia", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 6, No. 2, (May, 2020), hlm. 359.

kemiskinan.⁶ Menurut Hafiz, dkk., sektor keuangan dapat dikembangkan melalui empat cara yaitu dengan meningkatkan efisiensi sektor keuangan, memperluas jangkauan sektor keuangan, memperbaiki regulasi sektor keuangan, dan meningkatkan akses layanan keuangan dengan persentase yang lebih besar dari penduduk.⁷

Inklusi keuangan baru-baru ini disorot oleh pembuat kebijakan sebagai instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.⁸ Inklusi keuangan merupakan sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi,⁹ serta bertujuan untuk menarik penduduk yang tidak memiliki rekening bank ke dalam sistem keuangan formal sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengakses layanan keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, dan transfer hingga kredit dan asuransi.¹⁰

Pentingnya sistem keuangan inklusif diakui secara luas oleh para pembuat kebijakan dan dipandang sebagai prioritas kebijakan di banyak negara karena berbagai alasan. Pertama, memfasilitasi alokasi sumber daya

⁶ Ilori and David Babafemi, "Financial Sector Development and Poverty Reduction Nexus: Evidences from Nigeria", *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, Vol. 8, No. 3, (March, 2020), hlm. 2.

⁷ Hafiz Ghufuran Ali Khan et al., "Financial Sector Development And Poverty Reduction", *Global Journal of Management and Business Research*, Vol. 11, No. 5, (2011), hlm. 2.

⁸ Khoirunurrofik and Dipta Fitriatinnisa, "Financial Inclusion, Poverty, Inequality: Empirical Evidence from Provincial in Indonesia", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 10, No. 2, (2021), hlm. 206.

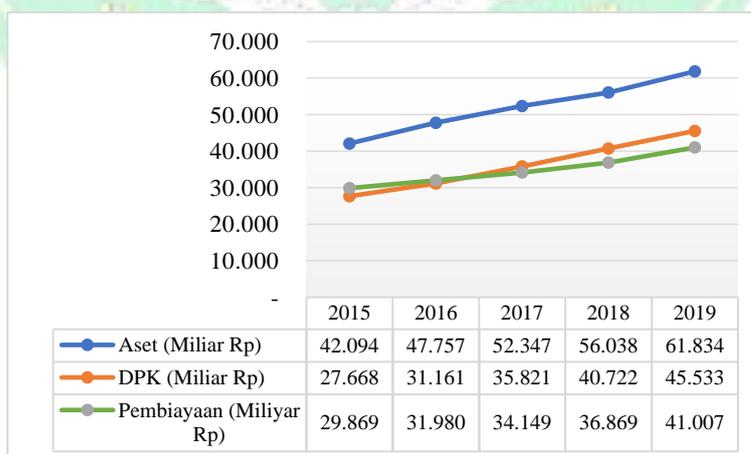
⁹ Mandira Sarma, "Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness", *Centre for International Trade and Development, School of International Studies*, (June, 2012), hlm. 3.

¹⁰ Alfred Hannig and Stefan Jansen, "Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues", *ADBI Working Paper*, Vol. 259, (December, 2010), hlm. 1.

produktif secara efisien. Kedua, akses ke layanan keuangan yang sesuai dapat secara signifikan meningkatkan pengelolaan keuangan sehari-hari. Dan ketiga, sistem keuangan yang inklusif dapat membantu mengurangi pertumbuhan sumber-sumber kredit informal (seperti rentenir) yang seringkali cenderung eksploitatif.¹¹

Sektor perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat terus menunjukkan perkembangan yang positif (gambar 1.1). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah aset pada tahun 2015 sekitar 42.094 milyar mengalami kenaikan menjadi 61.834 milyar pada tahun 2019, selain itu terjadi juga peningkatan dana pihak ketiga dari 27.668 milyar pada tahun 2015 menjadi 45.533 milyar pada tahun 2019, serta peningkatan pada pembiayaan dari 29.869 milyar menjadi 41.007 milyar pada tahun 2019.

Gambar 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah Di Jawa Barat

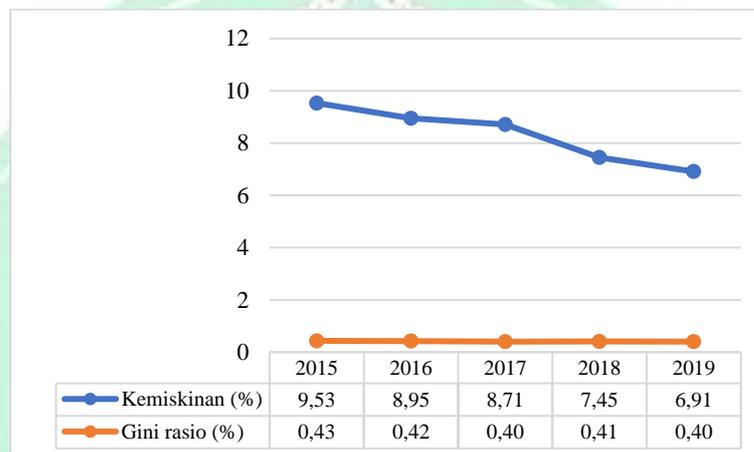


Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (diolah).

¹¹ Sarma, “Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness”, hlm. 1.

Meskipun Jawa Barat mencapai perkembangan keuangan yang cukup positif namun masih terdapat masyarakat Jawa Barat yang belum dapat mengakses jasa perbankan. Sindi Puspitasari, dkk. dalam penelitiannya menggambarkan dan mengukur tingkat inklusi keuangan pada sektor perbankan syariah di 33 provinsi di Indonesia menemukan bahwa indeks inklusi keuangan syariah di Jawa Barat tergolong dalam kategori rendah.¹²

Gambar 1.2
Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Barat



Sumber: BPS.

Fakta lainnya provinsi Jawa Barat masih menghadapi kemiskinan yang signifikan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), seperti terlihat pada gambar 1.2 Jawa Barat telah mencapai penurunan kemiskinan absolut yang luar biasa. Pada tahun 2015, sekitar 9,53 persen penduduk Jawa Barat hidup dalam kemiskinan absolut. Jumlah ini menurun drastis menjadi sekitar 6,91 persen pada tahun 2019, jauh di bawah proporsi penduduk Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan absolut pada saat itu 9,41 persen.

¹² Sindi Puspitasari, A. Jajang W Mahri, and Suci Aprilliani Utami, "Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1, (February, 2020), hlm. 6.

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan isu ketimpangan pendapatan,¹³ ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata.¹⁴ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka gini rasio di Jawa Barat berfluktuasi, pada tahun 2015 sekitar 0,43 persen dan menurun menjadi 0,40 persen pada tahun 2017, namun angka gini rasio mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 0,41 persen kemudian kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 0,40 persen. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik September 2018, rasio gini Jawa Barat berada di angka 0,405 jumlah tersebut masih lebih tinggi 0,021 poin dari angka nasional yakni 0,384. Secara nasional, tingkat ketidakmerataan di Jawa Barat menjadi yang tertinggi ketiga secara nasional setelah Yogyakarta dan Sulawesi yang menduduki peringkat pertama dan kedua.¹⁵

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai inklusi keuangan dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Omar dan Kazuo Inaba,¹⁶ menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh secara signifikan menurunkan kemiskinan dan ketimpangan

¹³ Sugiyarto, Jangkung Handoyo Mulyo, and Rosalia Natalia Seleky, "Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro", *Agro Ekonomi*, Vol. 26, No. 2, (December, 2016), hlm. 116.

¹⁴ Anton Tri Wijayanto, "Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2010", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 02, (2016), hlm. 420.

¹⁵ Tommi Andryandy, "Jawa Barat Masih Bermasalah Dengan Ketimpangan Ekonomi", <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01309560/jawa-barat-masih-bermasalah-dengan-ketimpangan-ekonomi>; diakses tanggal 8 Agustus 2020.

¹⁶ Md Abdullah Omar and Kazuo Inaba, "Does Financial Inclusion Reduce Poverty and Income Inequality in Developing Countries? A Panel Data Analysis", *Journal of Economic Structures*, Vol. 9, No. 1, (December, 2020), hlm. 37.

pendapatan. Namun pada penelitian Khoirunurrofik dan Dipta Fitriatinnisa¹⁷ yang menyelidiki keterkaitan antara inklusi keuangan, kemiskinan, dan ketimpangan dengan melihat bukti empiris dari 33 provinsi di Indonesia selama 2009-2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia dan terdapat hubungan positif yang signifikan antara inklusi keuangan dan ketimpangan.

Meski demikian hubungan inklusi keuangan dengan kemiskinan masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian tidak menemukan adanya efek inklusi keuangan terhadap kemiskinan. Neaime dan Gaysset¹⁸ dalam penelitiannya mengkaji dampak inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan stabilitas keuangan. Hasil penelitiannya menemukan inklusi keuangan tidak memiliki efek pada kemiskinan. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian Moch Bisyr Effendi dan Avi Sunani,¹⁹ dengan menggunakan sampel 6 negara Asean (Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Philipina), menemukan meningkatnya akses jasa keuangan akan mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

¹⁷ Khoirunurrofik and Fitriatinnisa, "Financial Inclusion, Poverty, Inequality: Empirical Evidence from Provincial in Indonesia", hlm. 211.

¹⁸ Simon Neaime and Isabelle Gaysset, "Financial Inclusion and Stability in MENA: Evidence from Poverty and Inequality", *Finance Research Letters*, Vol. 24, (March, 2018), hlm. 230-237.

¹⁹ Moch Bisyr Effendi and Avi Sunani, "Analysis of Access to Financial Services on Poverty Alleviation with MARS Approach", *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, Vol. 23, No. 1, (July, 2020), hlm. 125.

Pada penelitian lain mengenai inklusi keuangan dengan ketimpangan pendapatan, Neaime dan Gaysset²⁰ menemukan inklusi keuangan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di Middle East and North Africa (MENA). Hasil penelitian serupa ditemukan pada penelitian Zhang dan Posso²¹ di Cina, inklusi keuangan meningkatkan pendapatan rumah tangga khususnya di antara rumah tangga berpenghasilan rendah, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun berbeda dengan penelitian Harry Agintaa, dkk.,²² dengan menganalisis keterkaitan inklusi keuangan dengan ketimpangan pendapatan pada 33 provinsi di Indonesia, hasil penelitiannya menemukan di tingkat nasional, inklusi keuangan tidak berdampak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian inklusi keuangan sebelumnya dengan melihat dan mengkaji inklusifitas keuangan dalam konteks syariah untuk kemudian meneliti bagaimana hubungan dan pengaruhnya terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kebanyakan penelitian tentang masalah ini terbatas pada konteks non syariah, oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan pada literatur yang ada dengan mengkaji secara empiris hubungan dan pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat.

²⁰ Neaime and Gaysset, "Financial Inclusion and Stability in MENA", hlm. 230.

²¹ Quanda Zhang and Alberto Posso, "Thinking Inside the Box: A Closer Look at Financial Inclusion and Household Income", *The Journal of Development Studies*, Vol. 55, No. 7, (October 2017), hlm. 1–16.

²² Harry Aginta, Debby A Soraya, and Wahyu B Santoso, "Financial Development and Income Inequality in Indonesia: A Sub-National Level Analysis", *Economics and Finance in Indonesia*, Vol. 64, No. 2, (2018), hlm. 111.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat inklusi keuangan syariah di kabupaten/kota di Jawa Barat?
2. Bagaimana hubungan inklusi keuangan syariah dengan kemiskinan di Jawa Barat?
3. Bagaimana hubungan inklusi keuangan syariah dengan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kemiskinan di Jawa Barat?
5. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat inklusi keuangan syariah di kabupaten/kota di Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis hubungan inklusi keuangan syariah dengan kemiskinan di Jawa Barat.

3. Untuk menganalisis hubungan inklusi keuangan syariah dengan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kemiskinan di Jawa Barat.
5. Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan terkait inklusi keuangan syariah.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tinjauan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan maupun pemerataan distribusi pendapatan.

D. Paradigma Penelitian

Inklusi keuangan atau penggunaan layanan keuangan formal merupakan aspek pembangunan keuangan yang menarik banyak perhatian publik dan minat para peneliti di awal tahun 2000-an, berawal dari sebuah studi yang menghubungkan kemiskinan dengan eksklusi keuangan. Inklusi keuangan berarti bahwa semua orang dewasa dalam masyarakat memiliki akses ke

berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan ditawarkan dengan biaya yang wajar.²³

Literatur tentang eksklusi keuangan mengidentifikasi lima jenis pengecualian utama: pengecualian akses, di mana segmen populasi dikeluarkan dari sistem keuangan karena keterpencilan atau proses manajemen risiko sistem keuangan; pengecualian kondisi, pengecualian terjadi karena kondisi yang tidak sesuai untuk beberapa orang; pengecualian harga, pengecualian terjadi karena harga produk keuangan yang tidak terjangkau; dan pengecualian pemasaran, pengecualian terjadi karena harga produk keuangan yang tidak terjangkau; dan pengecualian diri, terjadi ketika sekelompok orang tertentu menolak untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan formal karena takut ditolak atau hambatan psikologis lainnya.²⁴

Fenomena penetrasi keuangan di kalangan masyarakat, kemudahan akses kredit, dan pemanfaatan jasa keuangan oleh masyarakat dalam menunjang usaha atau pekerjaannya merupakan cerminan dari inklusi keuangan. Meningkatkan akses dan mengembangkan sistem keuangan yang inklusif merupakan tujuan bagi perekonomian di semua tahap pembangunan. Friksi pasar keuangan dapat menjadi mekanisme penting untuk menghasilkan ketidaksetaraan pendapatan yang terus-menerus atau jebakan kemiskinan. Tanpa sistem keuangan yang inklusif, individu miskin dan usaha kecil hanya mengandalkan kekayaan pribadi atau sumber daya internal mereka untuk

²³ Abiola A Babajide, Folasade B Adegboye, and Alexander E Omankhanlen, "Financial Inclusion and Economic Growth in Nigeria", *International Journal of Economics and Financial Issues* 5, No. 3, (2015), hlm. 630.

²⁴ Stephen Sinclair, "Financial Exclusion: An Introductory Survey", *Centre for Research into Socially Inclusive Services*, (2001), hlm. 15.

berinvestasi dalam pendidikan mereka, menjadi wirausahawan, atau memanfaatkan peluang pertumbuhan yang menjanjikan. Ketidaksempurnaan pasar keuangan, seperti asimetri informasi dan biaya transaksi, kemungkinan besar akan secara khusus mengikat kaum miskin berbakat dan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan, riwayat kredit, dan koneksi, sehingga membatasi peluang mereka dan menyebabkan ketidaksetaraan yang terus-menerus dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.²⁵

Literatur tentang pengukuran inklusi keuangan relatif baru tetapi berkembang pesat. Honohan menghitung inklusi keuangan dengan menghitung proporsi penduduk/rumah tangga dewasa yang memiliki rekening bank menggunakan ekonometrika. Ukuran berdasarkan proporsi orang dewasa yang memiliki rekening bank secara efektif hanya mengukur satu aspek inklusi keuangan, yaitu penetrasi keuangan, sementara mengabaikan aspek penting lainnya seperti ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan penggunaan sistem keuangan yang semuanya berkontribusi membentuk sistem keuangan yang inklusif.²⁶

Hanya memiliki rekening bank mungkin tidak cukup untuk inklusi keuangan jika ada beberapa hambatan yang mencegah orang menggunakan rekening secara maksimal, seperti lokasi bank, biaya transaksi, cabang bank,

²⁵ Asli Demirgüç-Kunt, Thorsten Beck, and Patrick Honohan, *Finance for All?: Policies and Pitfalls in Expanding Access*, (Washington, DC 20433, USA: The World Bank, 2008), hlm. 21.

²⁶ Mandira Sarma, "Measuring Financial Inclusion", *Economics Bulletin*, Vol. 35, No. 1, (2015), hlm. 605.

dan hambatan psikologis.²⁷ Kempson dkk., mendefinisikan “*underbanked*” atau “*marginally banked*” sebagai orang-orang yang meskipun memiliki rekening bank, namun tidak menggunakannya secara maksimal. Di banyak negara, sebagian besar dari apa yang disebut *banked population* sebenarnya menggunakan layanan keuangan non-bank daripada fasilitas perbankan. Rumah tangga ini adalah bagian dari apa yang disebut rumah tangga *underbanked* atau *marginally banked* yang telah disamakan dengan rumah tangga yang dikecualikan secara finansial.²⁸

Sarma menggunakan metode multidimensi untuk mengukur inklusi keuangan dengan mempertimbangkan tiga dimensi dasar dari sistem keuangan inklusif yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan dan penggunaan sistem perbankan. Indeks inklusi keuangan menggabungkan informasi tentang ketiga dimensi tersebut menjadi satu nilai yang berkisar dari 0 hingga 1, nilai indeks inklusi keuangan yang besar menunjukkan tingkat inklusi keuangan yang lebih baik.²⁹

Zia dan Prasetyo melakukan penelitian menggunakan regresi data panel untuk menemukan pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Berdasarkan random effect model mereka menemukan inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif dan

²⁷ Elaine Kempson, Adele Atkinson, and Odile Pilley, “Policy Level Response to Financial Exclusion in Developed Economies: Lessons for Developing Countries”, *The Personal Finance Research Centre University of Bristol*, (2004), hlm. 4-7.

²⁸ Thai-Ha Le, Anh Tu Chuc, and Farhad Taghizadeh-Hesary, “Financial Inclusion and Its Impact on Financial Efficiency and Sustainability: Empirical Evidence from Asia”, *Borsa Istanbul Review*, Vol. 19, No. 4, (December, 2019), hlm. 2.

²⁹ Mandira Sarma and Jesim Pais, “Financial Inclusion and Development”, *Journal of International Development*, Vol. 23, No. 5, (July, 2011), hlm. 615.

signifikan terhadap kemiskinan dan pada pengujian dengan *fixed effect model* menemukan inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.³⁰

Sejalan dengan penelitian Zia dan Prasetyo, Park dan Mercado³¹ menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan dan menilai dampak inklusi keuangan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di dunia dan Asia. Temuan mereka menunjukkan secara jelas hubungan yang signifikan antara inklusi keuangan yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Di sisi lain, terdapat hubungan yang signifikan antara inklusi keuangan yang lebih tinggi dan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah.

Pada penelitian ini inklusi keuangan syariah diukur dengan indeks inklusi keuangan syariah ditentukan oleh dua dimensi yaitu: 1) aksesibilitas, yang digunakan untuk mengukur penetrasi keuangan syariah pada masyarakat miskin; 2) penggunaan, yang digunakan untuk mengukur penggunaan jasa keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemiskinan diukur dengan persentase penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, serta indeks gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Selanjutnya inklusi keuangan akan diuji hubungan dan pengaruhnya terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

³⁰ Zia and Prasetyo, "Analysis of Financial Inclusion Toward Poverty and Income Inequality", hlm. 119.

³¹ Cyn-Young Park and Rogelio Mercado, "Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality", *The Singapore Economic Review*, Vol. 63, No. 01, (March, 2018), hlm. 20.